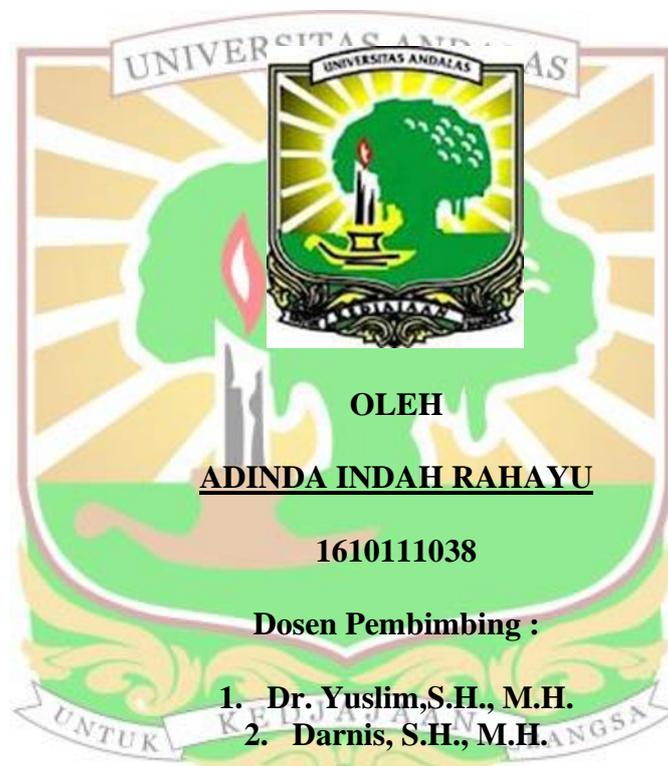


**SKRIPSI**

**Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang  
Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat  
Secara Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMNISTRASI NEGARA (PK VII)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2020**

**No. Reg. 13/PK-VII/I/2020**

	No. Alumni Universitas :	<b>Adinda Indah Rahayu</b>	No. Alumni fakultas :
	a) Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru / 19 April 1998 b) Nama Orang Tua : Marwan dan Sarni c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII) e) Nomor BP : 1610111038 f) Tanggal Lulus : 22 Januari 2020		g) Predikat Lulus : <b>Dengan Pujian</b> h) IPK : 3,87 i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Komplek Lubuk Gading Permai III Blok C No 1, RT 001 / RW 011, Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat

**Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas**

**ADINDA INDAH RAHAYU, BP 1610111038. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK VII (Hukum Administrasi Negara). 84 Halaman. Tahun 2020**

**ABSTRAK**

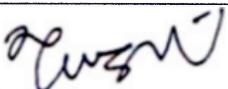
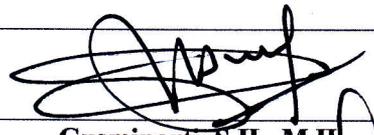
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaksanakan tugas pelaksanaan pengurangan risiko bencana inklusif berpedoman pada Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, kebijakan, program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses dan mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui layanan pendidikan baik formal maupun informal, dan latihan-latihan, simulasi dan geladi bencana. Namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan yang lebih menyeluruh dan terpadu dalam segi perencanaan dan aturan terkait. Berdasarkan alasan diatas akan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas? *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Padang dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko inklusif bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi, geladi bencana. *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh BPBD kota Padang dalam upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yaitu: terbatasnya aturan, kurangnya proaktivitas pemerintah, minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya perkembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu: perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan, pelatihan rutin secara berkala, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyandang Disabilitas, Pengurangan Risiko Bencana

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2020.

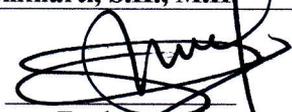
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	<b>Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.</b>	<b>Gusminarti, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H., M.H.**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

**Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang  
Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara  
Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas**

**ADINDA INDAH RAHAYU 1610111038. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK VII  
(Hukum Administrasi Negara). 84 Halaman. Tahun 2020**

**Pembimbing Dr. Yuslim, S.H.,M.H. & Darnis, S.H.,M.H.**

**ABSTRAK**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah nondiskriminatif dan memberikan prioritas perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana inklusif berpedoman pada Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, kebijakan, program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses dan mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui layanan pendidikan baik formal maupun informal, dan latihan-latihan, simulasi dan geladi bencana. Namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan yang lebih menyeluruh dan terpadu dalam segi perencanaan dan aturan terkait. Berdasarkan alasan di atas akan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang? *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Padang dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko inklusif bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi, geladi bencana. *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh BPBD kota Padang dalam upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yaitu: terbatasnya aturan, kurangnya proaktivitas pemerintah, minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya perkembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu: perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan, pelatihan rutin secara berkala, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat,

**Kata Kunci: Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana**